

BAB IV
A N A L I S A

Tauhid adalah semangat egalitarianisme dan semangat egalitarianisme baru bisa berjalan dengan baik, manakala berada dalam sistem yang demokratis. Dengan demikian setiap bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak adalah bertentangan dengan jiwa tauhid, ke-Tuhanan Yang Maha Esa atau Monoteisme. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada manusia adalah tidak adil dan tidak beradab.

Sikap yang pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan, menghendaki tatanan sosial yang terbuka, adil dan demokratis, dalam kaitannya dengan sistem otoriter telah tercantum dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 165, yaitu :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أُتُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ - (البقرة ١٦٥هـ)

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka menyesal).¹

Dari ayat ini dapat penulis katakan bahwa manusia yang seperti ini adalah manusia terbelenggu, manusia yang dikelilingi oleh nafsu serakah dan sulit untuk menerima kebenaran padahal sumber dari seluruh kekuatan itu adalah Allah Swt. Seluruhnya akan kembali kepada-Nya, karena Dialah pemilik segala sesuatu yang ada dalam semesta ini.

Dalam doktrin Islam setiap manusia adalah wakil-wakil Allah yang diberi amanah untuk melaksanakannya didunia tanpa adanya unsur-unsur yang masuk kepada sifat-sifat absurd, oleh karenanya watak inklusif dan demokratis adalah suatu sikap yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam Surat

An Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ سَبِّحْهُمُ ۝ ٥٥

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, p. 41

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, ...”²

Merujuk pada ayat diatas, dalam suatu masyarakat yang setiap orang menjadi khalifah Tuhan dan menjadi partisipan sederajat dalam khalifah, setiap perbedaan latar belakang yang didasarkan pada keturunan posisi sosial sama sekali tidak dapat dibenarkan. Semua manusia mempunyai posisi yang sama, dan satu-satunya pengukur superioritas orde sosial seperti ini adalah karakter pribadi.

Selain itu, dalam masyarakat seperti tidak terdapat seorangpun atau satu kelompok pun yang akan menderita karena diskriminasi berdasarkan keturunan, status sosial, ataupun profesi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemampuannya. Setiap orang dapat menikmati kesempatan yang sama untuk mengejar ketertinggalannya, dan setiap warga negara diperbolehkan mengembangkan kemampuan dan bakatnya

²*Ibid.*, p. 553

untuk mencapai puncak prestasi dalam segala lapangan kehidupan.

Islam dan ajaran tauhidnya dalam hal ini, tidak memberikan kesempatan bagi berlangsungnya kediktatoran karena setiap orang adalah khalifah Tuhan, sehingga tiada seorangpun yang dapat menjadi penguasa mutlak dengan menghilangkan hak rakyat. Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintah berarti ia mendapat tugas-tugas (amanah) administratif yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat tidak lebih dari itu. Sehingga ia bertanggung jawab kepada Allah di satu pihak dan bertanggung jawab kepada khalifah dalam hal ini rakyat pada umumnya di pihak lain. Sehingga pada konteks inilah al Maududy menawarkan suatu istilah lain yakni *Theodemocracy* dimana Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma dari Tuhan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa Islam yang merupakan sistem nilai sejak awal kehadirannya telah menunjukkan komitmen yang besar dalam melakukan pembebasan terhadap sifat-sifat yang dapat membelenggu jiwa

kiki tersebut pada dasarnya tidak
dasar demokrasi yang lebih menitik
amaan dan kebebasan yang m
lai-nilai kemanusiaan. Dari dua pri
si kemudian dielaborasi dalam
fat terbuka terhadap interpretasi,
implementasi prinsip kedaulatan

ini Islam secara substansial memba
emokrasi yang sejak kelahirann
itrah kemanusiaan dengan diland
bagai sebuah implementasi dari sik
a semata dan membebaskan dari
hal-hal yang palsu (*al-nafy, nega*
lainnya; dan secara berkesina

sosial yang pada akhirnya memberi kesanggupan bagi manusia dalam melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Sebagai konsekuensi logis dari semangat tauhid, akan timbul sikap menentang, melawan dan akhirnya menggugat tirani tersebut. Konsep tauhid dengan demikian dapat dipertentangkan dengan konsep tirani. Perbedaan prinsip manusia dengan pemahaman tauhid adalah kesadaran bahwa diantara sesama manusia tidak ada *diskriminasi* dengan mengedepankan persamaan, sedangkan kedudukan diatas manusia hanya

bagai konsekuensi logis dari semangat tauhid. Akibatnya timbul sikap menentang, melawan dan akhirnya menentang tirani tersebut. Konsep tauhid dengan demikian dapat dipertentangkan dengan konsep tirani. Hal ini sejalan dengan prinsip manusia dengan pemahaman tauhid yang menyadari bahwa diantara sesama manusia tidak ada *diskriminasi* dengan mengedepankan persamaan, sedangkan kedudukan diatas manusia hanya

—

utamanya kemerdekaan manusia yang didalam
an dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan merupak
paling mendasar bagi manusia sebagaimana haln
utuhan akan agama.